



PUTUSAN

Nomor 1508 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa , telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **M. SAID ATTAP TAZANI alias ITAP bin H. SULAIMAN KURDI;**

Tempat lahir : Martapura;

Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/14 Juni 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan KH Anang Sya'rani Rt.02 Rw. 01
Kelurahan Melayu Tengah, Kecamatan
Martapura Timur, Kabupaten Banjar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 Januari 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan Sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut ;

- Dakwaan Primair: Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; atau

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2019



- Dakwaan Subsidair: Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
- Dakwaan Lebih Subsidair : Bahwa Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 6 Juni 2018 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa M. Said Attap Tazani alias Itap bin. H. Sulaiman Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang didakwakan dalam Primair yaitu dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju jenis gamis bermotif warna warni merk FULLSLEEVES;
 - 1 (satu) lembar jilbab motif kotak- kotak warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu merk VAYA;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu muda merk LINGCAO ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2019



Dikembalikan kepada saksi Korban;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN Bjb, tanggal 11 Juli 2018, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Said Attap Tazani alias Itap Bin H. Sulaiman Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima belas) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju jenis gamis bermotif warna warni merk FULLSLEEVES;
 - 1 (satu) lembar jilbab motif kotak-kotak warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu merk VAYA;
 - 1 (satu) buah bh warna ungu muda merk LINGCAO;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 73/PID.SUS/2018/PT BJM, tanggal 24 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2019



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Juli 2018 Nomor 43/Pid.Sus/2018/PN. Bjb dengan perbaikan mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Said Attap Tazani alias Itap Bin H. Sulaiman Kurdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju jenis gamis bermotif warna warni merk FULLSLEEVES;
 - b. 1 (satu) lembar jilbab motif kotak-kotak warna kuning;
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu merk VAYA;
 - d. 1 (satu) buah bh warna ungu muda merk LINGCAO;Dikembalikan kepada saksi Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 Januari 2019;

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa sebagai pengelola di pengajian Sayyid Zainal Abidin Al Idrus, menyatakan bahwa dia adalah wali Allah yang akan membawa korban ke Rosulullah yang dengan paksa akhirnya korban berhasil disetubuhi Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan selain pada Korban Korban juga telah melakukan persetujuan kepada korban lain yang bernama Riatul Jannah dengan demikian, maka putusan *Judex Facti* tidak salah dan harus dipertahankan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. SAID ATTAP TAZANI alias ITAP bin H. SULAIMAN KURDI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung Pembaca II **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca II

Jakarta, 7 Oktober 2019

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1508 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)